

Dari Fiksi Resmi ke Rekonstruksi Peradilan: Analisis Narasi Yudisial Perbandingan Perkara Ferdy Sambo dan Laquan McDonald

Zul Khaidir Kadir *¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*e-mail: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id¹

Abstrak

Peralihan dari *official fiction* ke rekonstruksi yudisial tampak jelas dalam perkara Ferdy Sambo di Indonesia dan Laquan McDonald di Amerika Serikat. Yang dipersoalkan tidak hanya hasil akhir putusan atau terpenuhinya unsur delik, tetapi juga bagaimana cerita resmi mula-mula dipercaya, bukti apa yang merusaknya, dan bagaimana fakta hukum kemudian dirumuskan ulang oleh pengadilan. Dalam perkara Sambo, kepercayaan awal bertumpu pada kendali internal atas ruang kejadian, personel, dan arus informasi. Dalam perkara Laquan McDonald, kepercayaan itu bertumpu pada laporan ancaman dalam bentuk administratif kepolisian. Dasar tersebut pecah ketika *disruptive evidence* muncul dan tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam cerita awal karena inti penjelasannya rusak serta urutan kredibilitas ikut berubah. Dalam Sambo, keputusan itu terbentuk melalui akumulasi bukti. Dalam Laquan McDonald, keputusan bertumpu pada satu bukti jangkar lalu diperkuat oleh kontradiksi administratif yang serius. Sesudah itu, pengadilan tidak hanya menolak cerita resmi, tetapi juga menyusun ulang urutan kejadian dan dasar pertanggungjawaban pidana. Dari dua perkara ini terlihat bahwa sengketa pidana yang melibatkan aparat negara sering lebih dahulu menjadi sengketa tentang siapa yang berhak menentukan fakta, sebelum berubah menjadi sengketa tentang pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: *Ferdy Sambo, Laquan McDonald, Narasi Yudisial*

Abstract

The shift from official fiction to judicial reconstruction is clearly visible in the cases of Ferdy Sambo in Indonesia and Laquan McDonald in the United States. What is contested is not merely the final verdict or the fulfillment of the elements of the offense, but also how the official narrative initially gained credibility, what kind of evidence undermined it, and how the legal facts were later reformulated by the court. In Sambo, initial credibility rested on internal control over the crime scene, personnel, and the flow of information. In Laquan McDonald, it rested on a threat narrative presented through police administrative reporting. That basis collapsed when disruptive evidence emerged and could no longer be absorbed into the original story because its core explanation had broken down and the hierarchy of credibility had shifted. In Sambo, the rupture was produced through the accumulation of evidence. In Laquan McDonald, it rested on a single anchor piece of evidence reinforced by serious administrative contradictions. The courts then not only rejected the official narrative but also reformulated the sequence of events and the basis of criminal responsibility. These cases show that criminal disputes involving state officials often begin as disputes over who has the authority to define the facts before becoming disputes over criminal liability.

Keywords: *Ferdy Sambo, Judicial Narrative, Laquan McDonald*

PENDAHULUAN

Perkara pidana yang melibatkan aparat negara jarang dimulai dari medan fakta yang benar-benar terbuka. Yang lebih dulu hadir justru cerita resmi yang memberi bentuk pada kejadian, menentukan dari mana peristiwa dimulai, lalu menetapkan siapa yang tampak memulai dan siapa yang tampak bereaksi (Pears & Easteal, 2025). Dalam keadaan seperti itu, sengketa pidana tidak berhenti pada pembuktian unsur delik. Yang ikut dipersoalkan ialah siapa yang lebih dahulu berhak menamai kejadian dan menentukan arti faktualnya (Dagan & Zimran, 2023). Pada tahap inilah *judicial narrative* menjadi penting karena putusan tidak hanya menerapkan norma pada fakta yang sudah tersedia. Putusan juga menghubungkan bukti, menilai keandalan sumber, lalu merangkai potongan keterangan menjadi kenyataan hukum yang dapat dipakai sebagai dasar pemidanaan (Stern, 2024).

Masalah itu tampak jelas dalam perkara Ferdy Sambo dan Laquan McDonald. Kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 8 Juli 2022 mula-mula dilepas ke ruang publik sebagai akibat baku tembak di rumah dinas Duren Tiga. Penembakan Laquan McDonald oleh Jason Van Dyke pada 20 Oktober 2014 juga lebih dulu diterima melalui kerangka ancaman yang ditulis dalam laporan polisi. Kedua cerita itu tidak runtuh hanya

karena ada versi tandingan. Dasarnya melemah ketika pembuktian bergerak ke arah yang tidak lagi cocok dengan kerangka awal. Pada Sambo, perhatian kemudian tertuju pada perencanaan, pengarahan peran, pelaksanaan penembakan, dan tindakan yang berkaitan dengan sistem elektronik. Pada Laquan McDonald, dasar penilaian berpindah ke urutan gerak, jarak, dan proporsionalitas tindakan setelah video kamera dasbor dibuka ke publik dan laporan administratif mulai diuji terhadap rekaman itu.

Istilah *official fiction* atau fiksi resmi dipakai untuk menyebut narasi awal yang memperoleh kekuatan dari posisi institusional pembuatnya, lalu diterima lebih dulu sebelum diuji secara penuh (Li et al., 2024). Yang hendak ditandai bukan sekadar adanya kebohongan individual, melainkan adanya keistimewaan kelembagaan yang membuat satu versi lebih dahulu diterima sebagai penjelasan resmi. Rekonstruksi yudisial menunjuk pada keadaan ketika cerita awal tidak lagi dipakai sebagai kerangka yang netral, lalu fakta hukum dirumuskan kembali dari dasar pembuktian yang berbeda (Indarto, 2026). Dengan kerangka ini, perhatian tidak diarahkan pada soal siapa benar dan siapa salah dalam arti sederhana, melainkan pada cara cerita negara lebih dulu menguasai perkara dan cara pengadilan kemudian mengambil alih perumusan makna faktualnya.

Kajian tentang narasi dalam adjudikasi pidana sudah lama menjelaskan bahwa proses hukum tidak bekerja dengan fakta yang hadir sendiri (Mappaselleng & Kadir, 2025). Fakta hukum dibentuk dari potongan bukti, penarikan kesimpulan tentang urutan peristiwa, dan pemilihan satu versi yang dianggap cukup masuk akal untuk menopang putusan (Aden et al., 2025). Kajian tentang legitimasi kepolisian, akuntabilitas, dan *code of silence* juga membantu menjelaskan mengapa laporan resmi dapat bertahan meskipun gejala yang meragukan sudah muncul (Vakhitova et al., 2023). Kajian tentang bukti visual dan teknologi pengawasan memperlihatkan bahwa rekaman video dapat mengubah arah perkara, tetapi tidak setiap video mempunyai daya yang sama (Kadir, 2025). Yang masih kurang dibahas secara langsung ialah hubungan antara otoritas awal cerita resmi, jenis bukti yang mematahkannya, dan cara pengadilan kemudian menyusun ulang fakta setelah dasar cerita resmi runtuh (Backes et al., 2024).. Perkara Sambo dan Laquan McDonald mengisi ruang itu karena keduanya memperlihatkan bagaimana otoritas awal negara dibentuk, bagaimana otoritas itu pecah, dan bagaimana fakta kemudian dirumuskan ulang oleh pengadilan.

Tiga pertanyaan pokok muncul dari situ. Bagaimana narasi resmi dalam perkara Ferdy Sambo dan Laquan McDonald memperoleh otoritas awal. Bukti seperti apa yang menggugurkannya dan mengubah arah pembuktian. Lalu bagaimana fakta hukum dirumuskan kembali setelah cerita awal kehilangan pijakan. Jawabannya bergerak ke satu arah. Peralihan dari *official fiction* ke rekonstruksi yudisial tidak terutama terjadi karena jumlah bukti bertambah. Peralihan itu terjadi ketika *disruptive evidence* muncul dan tidak lagi dapat diserap ke dalam cerita resmi, sehingga urutan fakta harus dirumuskan kembali dari dasar yang berbeda.

METODE

Penelitian doktrinal dipadukan dengan analisis interpretatif komparatif atas teks putusan dan dokumen resmi. Perhatian tidak dibatasi pada norma positif semata. Putusan juga diperlakukan sebagai teks otoritatif yang melaluinya fakta hukum dirumuskan, sumber dipilih, urutan kejadian ditata, dan keandalan keterangan dinilai. Perkara Ferdy Sambo dan Laquan McDonald tidak dipilih karena unsur deliknya identik. Pemilihan didasarkan pada kesamaan masalah fungsional. Dalam kedua perkara itu, cerita resmi lebih dulu dikeluarkan oleh negara tentang suatu kematian, lalu cerita itu diguncang oleh bukti yang mengubah urutan siapa yang lebih dipercaya, dan pada tahap berikutnya fakta hukum dirumuskan kembali dari dasar yang berbeda.

Sumber utama yang dipakai meliputi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL., putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023, putusan banding *People v. Van Dyke*, 2020 IL App (1st) 191384, laporan OIG Chicago mengenai Officer Jason Van Dyke, dan keterangan resmi DOJ mengenai akhir penanganan federal atas perkara Laquan McDonald. Pembacaan diarahkan pada empat hal. Yang pertama adalah cerita resmi awal dan dasar kepercayaan yang menyertainya. Yang kedua adalah bukti yang mulai merusak cerita tersebut. Yang ketiga adalah cara pengadilan dan dokumen resmi menilai ulang hubungan antarbukti. Yang keempat adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang lahir setelah cerita resmi kehilangan posisinya. Perbandingan diarahkan pada fungsi naratif dan fungsi pembuktian dari dua perkara, tanpa klaim bahwa seluruh kenyataan historis di luar teks yudisial dan dokumen resmi dapat dirumuskan kembali secara utuh.

Perbandingan dalam penelitian ini tidak dilakukan untuk mencari persamaan unsur delik secara ketat. Dasar perbandingannya terletak pada fungsi naratif perkara. Dalam dua perkara ini, negara lebih dulu mengeluarkan cerita resmi tentang suatu kematian. Cerita itu lalu diuji oleh bukti yang mengubah arah pembuktian. Sesudah itu, pengadilan atau dokumen resmi yang punya bobot hukum menyusun kembali fakta yang dipakai untuk menentukan pertanggungjawaban. Karena dasar perbandingannya terletak pada fungsi seperti itu, perbedaan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat tidak menjadi penghalang utama. Perbedaan itu justru membantu menunjukkan bahwa masalah otoritas cerita resmi dapat muncul dalam bentuk yang berbeda. Pada Sambo, masalah itu muncul di dalam rantai komando dan kendali internal kepolisian. Pada Laquan McDonald, masalah itu muncul pada laporan ancaman, video dasbor, dan proses koreksi terhadap dokumen polisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Otoritas awal narasi resmi dalam perkara Ferdy Sambo dan Laquan McDonald

Kematian Yosua pada 8 Juli 2022 mula-mula dijelaskan sebagai akibat baku tembak di rumah dinas Duren Tiga. Akan tetapi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperlihatkan alur yang sama sekali berbeda. Yang muncul bukan benturan mendadak antarpersonel polisi, melainkan rangkaian tindakan yang telah diatur, mulai dari penentuan cerita, pengondisian orang-orang di sekitar terdakwa, pelaksanaan penembakan, sampai usaha mengaburkan jejak setelah korban meninggal. Jalur perkara itu kemudian berlanjut sampai putusan kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Dengan sendirinya, perkara ini tidak lagi dapat dibaca hanya sebagai sengketa tentang siapa menembak siapa. Yang muncul lebih awal justru sengketa tentang bagaimana cerita perkara dibentuk dan siapa yang menentukan dari mana cerita itu harus dimulai (Boutros, 2024).

Perkara Laquan McDonald bergerak melalui pola yang berbeda, tetapi soal dasarnya sebanding. Pada 20 Oktober 2014, Jason Van Dyke menembak Laquan McDonald di Chicago. Cerita awal bertumpu pada ancaman, yaitu bahwa McDonald membawa pisau dan menimbulkan bahaya yang menuntut respons mematikan. Dasar itu bertahan cukup lama karena didukung oleh laporan polisi dan bentuk administratif yang menyertainya. Titik balik datang ketika video kamera dasbor dibuka ke publik pada 24 November 2015, hari yang sama ketika Van Dyke didakwa atas pembunuhan tingkat pertama. Sesudah itu, dasar perkara berubah. OIG Chicago menyatakan bahwa Van Dyke membuat *false reports*, *false statements*, dan *material omissions* yang dipakai untuk membesar-besarkan ancaman yang konon ditimbulkan McDonald. Perkara pidananya berakhir dengan putusan juri yang menyatakan Van Dyke bersalah atas *second-degree murder* dan 16 dakwaan *aggravated battery with a firearm*.

Kalau dua perkara itu diletakkan berdampingan, pola dasarnya segera terlihat. Keduanya tidak dimulai dari fakta yang netral, melainkan dari cerita negara yang lebih dulu menempati bagian depan perkara. Pada Sambo, cerita awal dikendalikan dari dalam orbit komando dan diarahkan dengan menentukan titik mula kejadian. Pada Laquan McDonald, cerita awal bertahan melalui bobot administratif laporan ancaman dan kepercayaan awal terhadap keterangan petugas. Yang satu ditopang oleh kontrol internal atas orang, ruang, dan aliran informasi. Yang lain ditopang oleh bentuk prosedural yang membuat laporan polisi tampak layak dipercaya. Namun hasil awalnya sama. Sebelum pembuktian berjalan penuh, satu versi sudah lebih dulu berdiri sebagai penjelasan resmi (Boutros, 2024).

Dalam perkara yang melibatkan aparat negara, otoritas awal narasi resmi tidak terutama diperoleh karena ceritanya sudah teruji. Otoritas itu lahir karena cerita tersebut bergerak di dalam susunan kredibilitas yang timpang (Kadir, 2026b). Akses awal ke ruang kejadian, personel yang terkait, dokumentasi pertama, dan kategori administratif yang dipakai untuk menjelaskan apa yang terjadi dikuasai oleh negara (Camp, 2024). Akibatnya, cerita awal diterima sebagai kerangka mula-mula, bukan sebagai klaim yang segera dicurigai. Di sini, kedudukan formal lembaga bertemu dengan kemampuannya untuk menentukan titik mula cerita, memilih siapa yang layak dipercaya, dan menetapkan apa yang sejak awal tampak relevan dalam pembuktian.

Pada Sambo, hal itu paling jelas terlihat pada pengarahannya atas titik mula cerita. Bukan hanya isi keterangan yang diatur, tetapi juga urutan kejadian yang boleh dijadikan dasar penjelasan (Kuen & Kim, 2026). Saat pembacaan dakwaan di persidangan, arahan Sambo kepada pejabat yang menangani peristiwa itu dibacakan dengan kalimat, "Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren Tiga saja." Kalimat ini penting bukan sekadar karena nadanya mengarahkan. Yang lebih penting, ruang tafsir sejak awal dipersempit. Dengan titik mula seperti itu, hubungan sebab akibat dapat dibalik. Pihak tertentu tampak bereaksi, bukan memulai. Tindakan tampak spontan, bukan dirancang. Jadi, otoritas awal narasi resmi pada Sambo tidak cukup dijelaskan sebagai kemampuan mengeluarkan versi awal. Yang lebih menentukan adalah kemampuan mengunci dari mana peristiwa akan mulai dibaca (Hunt, 2025).

Pada Laquan McDonald, bentuknya tidak sehirarkis Sambo, tetapi efek awalnya serupa. Otoritas awal narasi resmi muncul melalui laporan ancaman yang dibungkus dalam bahasa prosedural polisi. Dalam perkara penggunaan kekuatan oleh polisi, kategori ancaman, respons,

dan kebutuhan tindakan tidak berhenti sebagai istilah deskriptif (Poirier & Boivin, 2024). Kategori itu sekaligus memberi arah pada penilaian hukum. Karena laporan awal disusun dalam bentuk yang administratif dan rutin, pada laporan itu lebih mudah dilekatkan anggapan awal bahwa isinya layak dipercaya (Hassan, 2025). Justru sifatnya yang tampak biasa membuatnya kuat. Dasar itu pecah ketika OIG Chicago menyatakan bahwa laporan, pernyataan, dan penghilangan fakta oleh Van Dyke dipakai untuk membesar-besarkan ancaman. Laporan yang semula tampak rutin akhirnya berubah menjadi objek kecurigaan.

Satu hal yang membuat perkara Sambo penting dibaca secara dekat adalah hubungan antara kedudukan jabatan dan kemampuan mengatur alur awal perkara. Dalam keadaan biasa, suatu versi kejadian harus bersaing dengan versi lain di ruang pembuktian. Pada Sambo, keadaan itu tidak terjadi sejak awal. Versi yang keluar dari lingkaran internal kepolisian lebih dulu mendapat tempat karena datang dari orang yang menguasai ruang kejadian dan orang-orang yang berada di sekitarnya (Barber & Tankebe, 2024). Dalam situasi seperti ini, cerita resmi tidak hanya mempunyai isi, tetapi juga mempunyai dukungan situasional. Itu sebabnya, ketika majelis kemudian membaca instruksi tentang Magelang dan Duren Tiga, putusan tersebut tidak hanya membahas satu kalimat arahan. Putusan sedang memperlihatkan bahwa titik mula perkara memang lebih dulu ditentukan. Dari sana, pengertian tentang siapa yang menyerang, siapa yang bertahan, dan siapa yang sekadar bereaksi ikut dibentuk. Hal itu menjelaskan mengapa otoritas awal narasi resmi pada Sambo tidak boleh dipahami hanya sebagai akibat dari jabatan. Yang lebih penting adalah hubungan antara jabatan, ruang, dan kontrol atas cerita awal (Socia et al., 2021).

Pada Laquan McDonald, hubungan seperti itu bekerja dengan cara yang lebih administratif. Laporan ancaman tidak memerlukan satu instruksi terbuka seperti yang terlihat pada Sambo. Laporan itu cukup bekerja dengan bentuknya sendiri. Karena laporan polisi disusun dalam bahasa resmi dan dalam jalur prosedural yang mapan, laporan tersebut lebih mudah diterima sebagai dasar awal penilaian. Ini menjelaskan mengapa cerita ancaman bertahan cukup lama sebelum video dibuka. Yang memberi kekuatan bukan hanya isi laporannya, tetapi juga bentuk lembaganya. Dokumen yang tampak biasa itu membawa keuntungan awal bagi versi polisi. Dari sini terlihat bahwa kelebihan posisi negara tidak selalu muncul sebagai kendali yang tampak jelas. Kelebihan itu juga bisa muncul lewat rutinitas administrasi yang membuat satu versi lebih mudah diterima bahkan sebelum diuji. Dalam perkara Laquan, justru sifatnya yang tampak prosedural membuat narasi resmi bisa bertahan lebih lama.

Pada Laquan McDonald, dokumen resmi juga memperlihatkan bahwa masalahnya tidak berhenti pada satu petugas yang memberi penjelasan tidak akurat. Temuan DOJ tentang *Chicago Police Department* menjelaskan adanya *code of silence* yang luas, termasuk kegagalan melaporkan pelanggaran dan kecenderungan melindungi sesama petugas. Dalam konteks seperti itu, laporan ancaman Van Dyke tidak berdiri sendiri. Laporan itu bergerak di dalam lingkungan kelembagaan yang terlalu mudah memberi ruang pada cerita yang membela petugas. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa otoritas awal narasi resmi pada Laquan tidak lahir dari laporan individual semata. Otoritas itu ditopang oleh susunan organisasi yang membuat laporan semacam itu lebih mudah dipercaya sebelum diuji secara ketat.

Dua perkara ini juga menunjukkan bahwa otoritas awal cerita resmi bergantung pada siapa yang pertama kali mendefinisikan keadaan. Dalam perkara pidana yang melibatkan aparat, definisi awal ini sangat penting. Jika suatu tindakan sudah lebih dulu diterima sebagai respons terhadap ancaman, maka pembuktian berikutnya akan bergerak dari titik itu. Jika suatu kematian sudah lebih dulu diterima sebagai akibat benturan mendadak, maka perhatian akan diarahkan pada benturan itu, bukan pada kemungkinan adanya pengaturan yang mendahuluinya (Leigh, 2022). Di titik ini, persoalannya bukan lagi sederhana. Yang sedang bekerja bukan hanya keterangan tentang fakta, tetapi penempatan fakta di dalam kategori tertentu. Pada Sambo, kategorinya dibentuk lewat cerita baku tembak. Pada Laquan, kategorinya dibentuk lewat ancaman yang diklaim dalam laporan polisi. Setelah kategori itu dipasang, proses pembuktian awal cenderung mengikutinya. Karena itu, ketika kategori tersebut kemudian runtuh, yang berubah bukan hanya detail perkara, tetapi seluruh jalur pembacaannya.

Perbandingan ini memberi hasil yang lebih tajam daripada sekadar pernyataan bahwa dua perkara sama-sama melibatkan polisi. Pada Sambo, kekuatan narasi resmi berasal dari orbit komando internal yang terkonsentrasi. Pada Laquan McDonald, kekuatan itu berasal dari format prosedural yang sejak awal diberi kepercayaan. *Official fiction* tidak selalu lahir sebagai fabrikasi kasar yang terpusat. Ia juga dapat lahir dari rutinitas prosedural yang tampak biasa, tetapi efektif karena dibungkus oleh bahasa birokrasi dan deferensi awal terhadap aparat. Di dua perkara tersebut, masalah awalnya bukan kekurangan fakta, tetapi adanya ketimpangan susunan kredibilitas (Raver et al., 2023). Cerita resmi lebih dulu menikmati keistimewaan untuk menentukan arti kejadian sebelum diuji sebagai objek pembuktian. Karena itu, yang lebih dahulu pecah bukan sekadar isi cerita, melainkan struktur kepercayaan yang menopangnya.

2. Bukti yang mematahkan narasi resmi dan mengubah arah pembuktian

Perubahan arah pembuktian dalam dua perkara ini tidak cukup dijelaskan dengan mengatakan bahwa bukti baru akhirnya tersedia. Penjelasan seperti itu terlalu datar. Pada tahap awal, cerita resmi sudah lebih dahulu berada di bawah perlindungan anggapan awal bahwa sumber tersebut layak dipercaya. Selama perlindungan itu belum pecah, bukti tambahan masih dapat diartikan sebagai rincian yang belum lengkap. Karena itu, yang perlu dijelaskan bukan hanya jenis bukti yang muncul, tetapi cara bukti tertentu mengubah posisi narasi resmi dari kerangka awal penjelasan menjadi objek verifikasi (Sunde, 2022).

Disruptive evidence menunjuk pada bukti yang tidak sekadar merugikan narasi resmi, melainkan menyerang titik sentral cerita, mengubah urutan siapa yang lebih dipercaya, lalu memaksa pengadilan menata ulang urutan kejadian. Ukurannya tidak ditentukan oleh mediumnya. Bukti visual tidak otomatis menjadi bukti pemutus. Bukti nonvisual juga dapat sangat menentukan bila posisinya mampu merusak dasar utama yang membuat cerita resmi tetap bertahan. Dengan dasar ini, dua bentuk kerja bukti dapat dibedakan. Isi cerita resmi dapat digugurkan oleh satu jenis bukti (McCluskey & Uchida, 2023). Pada saat yang sama, medium dan perangkat yang membuat cerita itu bertahan juga dapat dirusak oleh jenis bukti yang lain.

Dalam perkara Sambo, pemutusan dibentuk oleh akumulasi bukti. Cerita baku tembak tidak jatuh oleh satu bukti tunggal, tetapi oleh sejumlah bukti yang saling mengunci. Kontradiksi keterangan, perubahan pada penilaian forensik, dan persoalan seputar titik mula kejadian membuat penjelasan awal kehilangan kemampuan untuk menyatukan fakta-fakta lain (Huff et al., 2023). Sebagian isi cerita dilemahkan oleh satu bukti. Bagian lain ditekan oleh bukti berikutnya. Pada akhirnya, narasi resmi tidak lagi sanggup menampung seluruh fakta tanpa merusak keterhubungan dasarnya sendiri. Karena itu, perubahan perkara tidak lagi bergerak dari kekurangan bukti menuju kecukupan bukti. Yang terjadi justru ketidakmampuan cerita awal untuk mempertahankan diri sebagai kerangka utama.

Pada Sambo, pemutusan itu juga menyentuh sarana pemeriksaan perkara. Putusan tingkat pertama menegaskan bahwa sistem elektronik merupakan “serangkaian perangkat” dan bahwa “ketika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.” Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa unsur ITE tidak diperlakukan sebagai tambahan teknis belaka. Yang terganggu bukan hanya isi fakta, tetapi juga jalur yang seharusnya membawa hukum pada fakta. Karena itu, bukti tentang sistem elektronik di sini menggugurkan bukan hanya isi cerita baku tembak, melainkan juga sarana yang seharusnya dipakai untuk memeriksa cerita tersebut. Dari titik ini, pembuktian pada Sambo tidak lagi dapat dibaca sebagai penambahan fakta secara bertahap, tetapi sebagai hancurnya kemampuan cerita awal untuk tetap menjadi kerangka utama perkara (Berge & Sunde, 2026).

Ada satu hal yang sering luput kalau perkara Sambo hanya dibaca sebagai kasus yang akhirnya “terungkap” karena bukti semakin banyak. Yang berubah sebenarnya bukan sekadar isi pembuktian, tetapi juga urutan kerja pembuktian. Pada tahap awal, cerita baku tembak lebih dulu memberi arah tentang bukti mana yang dianggap penting dan bukti mana yang dianggap pelengkap. Setelah cerita itu goyah, urutannya berbalik. Bukti tidak lagi dibaca di bawah bayang-bayang cerita resmi. Cerita resmilah yang diuji terhadap bukti yang terkumpul. Ini penting karena memperlihatkan bahwa runtuhnya narasi resmi bukan peristiwa yang hanya menyangkut apa

yang benar terjadi. Runtuhnya narasi resmi juga menyangkut perubahan dalam cara perkara diperiksa. Begitu titik mula penjelasan bergeser, fakta yang semula dianggap pinggir ikut berubah posisi. Dari sinilah terlihat mengapa pembuktian dalam perkara Sambo tidak dapat dipahami sebagai penguatan bertahap atas satu cerita tandingan, melainkan sebagai pelepasan perkara dari kerangka cerita resmi yang semula mengikatnya.

Penekanan ini juga membuat posisi unsur sistem elektronik menjadi lebih terang. Kalau unsur itu hanya dibaca sebagai tambahan teknis sesudah penembakan, nilainya akan kecil. Akan tetapi, jika ia dibaca dalam kaitannya dengan jalur pembuktian, artinya berubah. Yang tampak kemudian ialah bahwa sesudah penembakan, perhatian tidak hanya diarahkan pada tubuh korban atau pada keterangan para saksi, tetapi juga pada medium yang menyimpan jejak kejadian. Dengan begitu, unsur sistem elektronik menunjukkan bahwa sengketa ini tidak hanya berada pada tingkat siapa melakukan apa, tetapi juga pada tingkat bagaimana jejak tentang apa yang dilakukan itu diatur, dipertahankan, atau dihapus. Di titik ini, putusan Sambo memperlihatkan satu bentuk pembuktian yang sangat khas pada perkara yang melibatkan aparat negara. Yang harus dibongkar bukan hanya tindakan inti, tetapi juga cara keadaan sesudah tindakan itu dibuat agar lebih sulit diperiksa.

Dalam perkara Laquan McDonald, pola yang berbeda diperlihatkan. Jika Sambo pecah melalui akumulasi, Laquan lebih tepat diartikan melalui keputusan yang bertumpu pada satu bukti jangkar. Bukti itu segera mengubah orientasi perkara, lalu diperkuat oleh bahan lain yang datang kemudian. Bukti jangkar tersebut ialah video kamera dasbor. Namun arti pentingnya tidak terletak semata pada sifat visualnya (Stacey et al., 2025). Video menjadi bukti pemutus karena dasar hukum utama yang dipakai untuk membenarkan narasi resmi dirusak olehnya, yaitu klaim ancaman yang dipakai untuk menopang penggunaan kekuatan mematikan.

Rekaman itu tentu tidak bebas tafsir. Penilaian atas jarak, arah gerak, urutan waktu, dan konteks kejadian tetap diperlukan. Meski begitu, fungsinya sangat khusus. Titik mula penarikan kesimpulan dipindahkan oleh rekaman tersebut. Sebelum video hadir, perkara dimulai dari laporan ancaman. Setelah video hadir, perkara harus dimulai dari urutan visual kejadian, lalu laporan resmi baru dibandingkan dengan bukti itu. OIG Chicago bahkan menyebut rekaman tersebut sebagai “the most objective and reliable” evidence. Kalimat ini menjelaskan mengapa video tidak hanya menambah rincian. Yang diubah ialah dasar awal penilaian. Laporan polisi turun derajat dari sumber awal yang dipercaya menjadi objek yang harus diuji (Keatley, 2025).

Pada Laquan McDonald, perubahan urutan nilai bukti itu juga tampak jelas. Sebelum video dibuka, laporan polisi lebih mudah diterima sebagai sumber utama yang menjelaskan apa yang terjadi. Setelah video dibuka, nilai laporan itu berubah. Ia tidak lagi dinilai dari bentuknya sebagai dokumen resmi, tetapi dari kesesuaiannya dengan urutan visual kejadian. Dari sini terlihat bahwa pembuktian tidak selalu berubah karena ada bukti baru dalam arti sederhana. Pembuktian berubah ketika suatu bukti cukup kuat untuk memaksa penilaian ulang terhadap sumber yang semula lebih dipercaya. Inilah yang membuat video pada Laquan sangat penting. Rekaman itu tidak hanya memberi tambahan gambar (Di Nota et al., 2024). Rekaman itu mengubah urutan siapa yang harus lebih dulu dipercaya. Pada tahap itu, laporan polisi tidak lagi memimpin pembacaan perkara. Ia mengikuti pembacaan yang dibentuk oleh bukti lain.

Efek video ini makin kuat karena segera diikuti oleh pembongkaran administratif. OIG tidak berhenti pada kesimpulan bahwa video bertentangan dengan narasi Van Dyke. OIG melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa terdapat *false reports*, *false statements*, dan *material omissions* yang semuanya dipakai untuk “exaggerate the threat McDonald posed.” Itu berarti pusat persoalannya bukan sekadar perbedaan antara rekaman dan laporan. Yang dipersoalkan adalah bahwa ancaman yang dipakai sebagai dasar pembenaran ternyata diperbesar lewat bahasa administratif polisi. Dari sini terlihat bahwa *disruptive evidence* pada Laquan juga bekerja dalam dua lapis, sama seperti Sambo, meskipun jalurnya berbeda. Lapis pertama merusak isi justifikasi. Lapis kedua merusak dasar kepercayaan pada dokumen yang semula dipakai untuk menopang justifikasi itu.

Dari dua perkara ini juga terlihat bahwa bukti pemutus hampir selalu bekerja bersama penurunan nilai atas sumber resmi. Pada Sambo, akumulasi bukti membuat cerita baku tembak

tidak lagi sanggup mengatur keseluruhan perkara. Pada Laquan, video dan temuan OIG membuat laporan ancaman kehilangan bobot awalnya. Jadi, yang terjadi bukan hanya munculnya fakta baru. Yang terjadi adalah perubahan dalam susunan kepercayaan. Sumber yang semula berada di depan turun ke belakang. Bukti yang semula mungkin dianggap pelengkap justru naik menjadi dasar penilaian (Martínez-Garay, 2023). Karena itu, pembuktian dalam perkara semacam ini tidak cukup dipahami sebagai pengumpulan data. Pembuktian lebih tepat dipahami sebagai proses yang mengubah susunan siapa yang bisa dipercaya dan dalam urutan apa kepercayaan itu harus dibangun.

Perbandingan ini perlu ditegaskan karena di sinilah nilai utama analisis komparatifnya. Pada Sambo, pusat cerita resmi pecah karena terlalu banyak bagian yang tidak lagi dapat disambungkan satu sama lain. Pada Laquan, pusat cerita resmi pecah karena satu bukti jangkar memindahkan titik mula penilaian, lalu bahan administratif resmi menjelaskan bahwa laporan awal memang disusun dengan cara yang menyesatkan. Yang satu menunjukkan keputusan yang tumbuh dari akumulasi. Yang lain menunjukkan keputusan yang bertumpu pada satu jangkar bukti. Tetapi keduanya mengarah pada hasil yang sama. Cerita negara kehilangan posisinya sebagai penjelasan yang lebih dulu dipercaya. Sesudah itu, pengadilan tidak lagi bekerja di bawah horizon cerita resmi, melainkan di atas reruntuhannya.

3. Rekonstruksi yudisial setelah narasi resmi kehilangan otoritas

Begitu cerita resmi kehilangan dasar, pertanyaan berikutnya bukan lagi cerita mana yang lebih menarik, tetapi bagaimana pengadilan menyusun ulang fakta. Di sinilah isi putusan menjadi sangat penting. Pengadilan tidak sekadar memilih antara dua versi yang bersaing. Yang dilakukan adalah memilih fakta mana yang dipertahankan, fakta mana yang dibuang, hubungan mana yang diperkuat, dan urutan mana yang harus dipakai sebagai tulang punggung perkara. Dalam arti itu, rekonstruksi yudisial adalah kerja pengaturan ulang Gatti & Evolvi, 2024). Fakta tidak diterima begitu saja, tetapi ditempatkan kembali ke dalam struktur baru yang sanggup menopang pertanggungjawaban pidana (Günther, 2024).

Dalam perkara Sambo, hasil pengaturan ulang itu luas dan rapat. Majelis tidak berhenti pada penolakan terhadap cerita baku tembak. Yang dilakukan lebih jauh adalah membangun satu urutan sebab akibat yang baru. Di dalam urutan itu, beberapa unsur yang semula tampak berada di pinggir justru dipindahkan ke pusat. Pengarahan cerita, pembagian peran, penempatan orang di lokasi tertentu, pelaksanaan penembakan, dan tindakan sesudah kematian korban tidak lagi dibaca sebagai potongan kejadian yang terpisah. Semuanya dirangkai menjadi satu jalur yang menjelaskan mengapa pembunuhan itu dipandang sebagai pembunuhan berencana dan mengapa tindakan sesudahnya tidak dianggap sebagai kejadian sampingan (Pardo, 2026). Dari pembacaan seperti ini terlihat bahwa rekonstruksi yudisial pada Sambo tidak bersifat korektif dalam arti sempit. Rekonstruksi itu bersifat menyeluruh. Ia mengganti pusat penjelasan perkara (Kadir, 2026a).

Hal yang paling tajam ada pada cara majelis menurunkan derajat unsur yang semula dipakai untuk menopang cerita awal. Peristiwa Magelang dan dugaan pelecehan, yang lebih dulu ditempatkan sebagai latar penjas, tidak lagi memegang fungsi yang sama ketika dasar pembuktiannya tidak memadai. Sebaliknya, unsur yang semula tampak lebih teknis, seperti pengarah cerita dan gangguan terhadap sistem elektronik, justru diangkat menjadi unsur yang menentukan. Ini berarti pengadilan tidak hanya menambahkan temuan baru ke dalam cerita lama (Picinali, 2023). Pengadilan membalik hierarki pentingnya fakta. Di sinilah rekonstruksi yudisial Sambo menjadi tajam. Yang dipindahkan bukan hanya isi pertimbangannya, tetapi juga bobot dari masing-masing unsur di dalam perkara.

Pada Sambo, rekonstruksi yudisial menjadi lebih jelas bila dilihat dari cara pengadilan memperlakukan fakta yang tidak lagi dianggap penting. Di dalam cerita awal, ruang penjelasan dibuat sempit. Beberapa unsur didorong ke depan, sementara unsur lain diletakkan di pinggir. Setelah pembuktian berubah arah, susunan itu dibalik. Hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai latar penjas kehilangan bobotnya karena tidak lagi didukung pembuktian yang memadai. Sebaliknya, hal-hal yang sebelumnya tampak kecil justru naik menjadi unsur penting. Dengan cara ini, pengadilan tidak hanya memilih fakta yang benar menurut versinya. Pengadilan juga

menyusun ulang tingkat kepentingan antarfakta. Ini penting karena perkara pidana tidak pernah dibentuk hanya dari fakta mentah. Perkara dibentuk dari fakta yang dipilih, diberi bobot, dan dihubungkan satu sama lain. Pada Sambo, kerja seperti ini terlihat jelas karena hasil akhirnya adalah satu rangkaian yang utuh dari awal sampai akhir.

Dengan pembalikan itu, bentuk pertanggungjawaban pidananya juga berubah. Kalau cerita awal dipertahankan, perkara akan cenderung dibaca sebagai benturan mendadak dengan penjelasan yang sempit. Tetapi setelah fakta dirangkai ulang, perkara itu dibaca sebagai rangkaian tindakan yang disusun, dijalankan, lalu ditopang oleh upaya mengendalikan jalur pembuktian. Artinya, rekonstruksi yudisial pada Sambo tidak hanya menghasilkan narasi baru. Ia juga menghasilkan bentuk tanggung jawab pidana yang lebih luas. Perubahan naratif dan perubahan pertanggungjawaban berjalan bersama.

Dalam perkara Laquan McDonald, jalurnya lebih sempit tetapi tidak kurang tegas. Rekonstruksi di sini tidak dibangun dengan menyatukan rangkaian perencanaan yang panjang. Yang dilakukan adalah mengoreksi titik tolak perkara dan mempersempit ruang membenaran. Begitu video dipakai sebagai dasar baru dan laporan ancaman diturunkan derajatnya menjadi objek kecurigaan, perkara tidak lagi dimulai dari klaim ancaman. Perkara dimulai dari urutan visual kejadian (Ho, 2025). Dari situ ancaman, jarak, gerak, dan proporsionalitas dinilai ulang. Ini penting karena menunjukkan bahwa rekonstruksi yudisial pada Laquan bukan soal menyusun cerita yang lebih rumit. Justru sebaliknya. Ia soal memotong alasan-alasan membenaran yang sebelumnya terlalu mudah diterima.

Begitu video kamera dasbor dipakai sebagai titik mula penarikan kesimpulan yang baru, laporan ancaman tidak lagi dapat mempertahankan fungsinya sebagai kerangka hukum awal yang tetap. Putusan bersalah terhadap Van Dyke lahir dari penilaian yang lebih ketat atas urutan gerak, proporsionalitas, dan hubungan antara ancaman yang diklaim dengan tindakan yang dilakukan. Perubahan pusat bobot fakta juga terlihat jelas. Laporan ancaman yang semula menempati posisi pusat sebagai medium hukum diturunkan derajatnya menjadi objek kecurigaan. Sebaliknya, urutan visual kejadian dipindahkan ke pusat penjelasan. Yang berubah bukan hanya soal bukti. Otoritas juga ikut berubah. Apa yang sebelumnya dipercaya karena bentuk administratifnya kini harus diuji berdasar kesesuaiannya dengan bukti lain.

Hasil akhirnya terlihat pada titik penutup perkara. DOJ kemudian menyebut bahwa proses itu menghasilkan "historic convictions of second-degree murder and sixteen counts of aggravated battery with a firearm." Kutipan ini penting bukan untuk memberi penekanan moral, tetapi untuk menunjukkan bahwa perubahan susunan fakta berujung pada perubahan dasar pertanggungjawaban yang nyata. Laporan ancaman tidak lagi menjadi alasan utama membenaran. Yang menjadi dasar justru susunan fakta yang dibentuk setelah video dan evaluasi administratif dibaca bersama. Dari sini, karakter rekonstruksi Laquan menjadi jelas. Ia bersifat korektif dan restriktif. Korektif karena titik tolak perkara diperbaiki. Restriktif karena ruang membenaran penggunaan kekuatan mematikan dipersempit secara tajam.

Pada Laquan McDonald, kerja yang sama berjalan lebih singkat tetapi tetap tegas. Begitu video dijadikan dasar awal, laporan ancaman tidak lagi punya posisi yang sama. Dari situ, pengadilan dan dokumen resmi tidak perlu menyusun cerita yang panjang. Yang mereka lakukan adalah mempersempit persoalan sampai ke inti. Inti itu adalah apakah ancaman yang diklaim benar-benar terlihat dalam urutan kejadian yang terekam dan apakah penggunaan kekuatan mematikan masih dapat diterima bila diukur dari situ. Karena jalurnya seperti ini, rekonstruksi pada Laquan terasa lebih langsung. Akan tetapi, justru di situlah nilainya. Pengadilan tidak tenggelam dalam banyak cabang penjelasan. Pengadilan memotong dasar membenaran sampai yang tersisa hanya tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Ini membuat hasil akhirnya sangat jelas. Cerita resmi kehilangan tempat, bukan karena ada banyak teori tandingan, tetapi karena dasar faktual yang menopangnya tidak lagi dapat dipertahankan.

Kalau dua jalur ini diletakkan berdampingan, satu hal menjadi terang. Rekonstruksi yudisial tidak punya satu bentuk tetap. Bentuknya bergantung pada cara narasi resmi mula-mula dibangun. Ketika narasi resmi dibangun melalui penguasaan ruang, orang, dan arus informasi, seperti pada Sambo, pengadilan perlu merangkai ulang perkara dalam skala yang lebih luas.

Ketika narasi resmi dibangun melalui laporan administratif ancaman, seperti pada Laquan, pengadilan perlu mengoreksi titik mula dan menurunkan derajat kepercayaan pada laporan itu (Dahlman, 2024). Karena itu, nilai komparatif dua perkara ini bukan sekadar karena keduanya terkenal atau sama-sama melibatkan polisi. Nilainya terletak pada kenyataan bahwa keduanya menunjukkan dua cara berbeda tentang bagaimana pengadilan mengambil alih kembali otoritas untuk menentukan fakta.

Dengan demikian, posisi hakim tidak cukup dijelaskan sebagai penilai alat bukti. Pada tahap ini, posisi hakim tidak cukup dipahami sebagai penilai alat bukti. Dalam dua perkara ini, hakim bertindak sebagai *arbiter of narrative legitimacy* (Cuppini, 2026). Pada Sambo, baku tembak dan latar Magelang tidak lagi dipakai sebagai horizon utama, lalu perkara ditata ulang di sekitar perencanaan, pembagian peran, dan pengendalian jejak elektronik. Pada Laquan, status istimewa laporan ancaman dihapus, lalu tindakan petugas dinilai ulang melalui rekaman visual dan evaluasi yang lebih ketat terhadap klaim pembenaran. Dengan cara itu, hakim tidak hanya bekerja di dalam bukti, tetapi juga di dalam susunan kepercayaan yang mengelilingi bukti. Sumber mana yang kehilangan otoritas dan kerangka mana yang tidak lagi sah untuk mengikat fakta lain diputus melalui proses itu.

Meski demikian, rekonstruksi yudisial tidak boleh dimengerti sebagai pengembalian penuh atas kejadian yang sebenarnya. Pengadilan tidak pernah mengembalikan kejadian secara total. Yang dihasilkan ialah susunan fakta yang cukup untuk menjadi dasar pertanggungjawaban hukum dalam batas pembuktian, relevansi, dan kebutuhan pemeriksaan perkara. Pada Sambo, putusan berhasil menyatukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengaburan jejak ke dalam satu bentuk pertanggungjawaban yang koheren, tetapi itu tidak berarti seluruh dimensi institusional perkara sepenuhnya selesai di dalam putusan. Pada Laquan, justifikasi ancaman berhasil ditolak karena tidak lagi cocok dengan bukti visual, tetapi hasil itu juga tidak identik dengan penyelesaian penuh terhadap masalah organisasi yang membuat laporan awal bertahan.

KESIMPULAN

Narasi resmi dalam perkara Ferdy Sambo dan Laquan McDonald memperoleh otoritas awal bukan karena sejak awal lebih akurat, melainkan karena keluar dari sumber yang lebih dulu dipercaya. Dalam perkara Sambo, dasar itu bergantung pada kendali internal atas ruang kejadian, personel, dan arus informasi, sehingga versi awal dapat ditetapkan sebelum diuji secara terbuka. Dalam perkara Laquan McDonald, dasar itu bergantung pada laporan ancaman yang dibungkus dalam bentuk administratif polisi, sehingga cerita awal lebih mudah diterima sebagai dasar penjelasan. Dasar itu kemudian runtuh setelah muncul bukti yang tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam cerita awal. Pada Sambo, keruntuhan itu lahir dari akumulasi kontradiksi, bukti forensik, dan gangguan terhadap sistem elektronik. Pada Laquan McDonald, keruntuhan itu dipicu oleh video kamera dasbor lalu diperkuat oleh temuan resmi tentang laporan palsu, penghilangan fakta material, dan pembesaran ancaman.

Setelah narasi resmi kehilangan dasar, pengadilan tidak hanya memilih versi yang berbeda, tetapi merumuskan kembali fakta hukum dari titik tolak yang baru. Dalam perkara Sambo, perumusan ulang itu dilakukan dengan merangkai perencanaan, pembagian peran, pelaksanaan, dan pengaburan jejak ke dalam satu rangkaian sebab akibat yang utuh. Dalam perkara Laquan McDonald, perumusan ulang itu dilakukan dengan menolak laporan ancaman sebagai dasar pembenaran, lalu menilai ulang tindakan aparat dari urutan visual kejadian dan ukuran proporsionalitas yang lebih ketat. Dari dua perkara ini dapat disimpulkan bahwa sengketa pidana yang melibatkan aparat negara pada dasarnya merupakan sengketa tentang otoritas penentuan fakta. Pada tahap awal, otoritas itu dikuasai oleh institusi negara melalui cerita resmi. Pada tahap akhir, otoritas itu dipindahkan ke pengadilan melalui rekonstruksi yudisial yang membentuk dasar pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aden, H., Lennon, G., Mouhanna, C., Roach, K., Johansen, A., & Uranaka, C. (2025). The rule of law under permanent pressure and the compensatory role of external accountability: A comparative study of independent police complaints bodies. *Zeitschrift Für Vergleichende Politikwissenschaft*, 19(2), 339–360. <https://doi.org/10.1007/s12286-025-00649-8>
- Backes, B. L., Masters, M., Roman, K., Wasim, A., & Wood, L. (2024). Leveraging video evidence in domestic violence misdemeanour cases: Examination of case dispositions and case length. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 18. <https://doi.org/10.1093/police/paae011>
- Barber, M., & Tankebe, J. (2024). Tracking procedural justice in stop and search pedestrian encounters with police body-camera records. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 18. <https://doi.org/10.1093/police/paae074>
- Berge, A. W., & Sunde, N. (2026). Competing narratives: A comparative case study of prosecutors' and defence lawyers' interpretations of digital evidence. *The International Journal of Evidence & Proof*. <https://doi.org/10.1177/13657127261441444>
- Boutros, M. (2024). The epistemic power of the police. *Theoretical Criminology*, 28(4), 495–515. <https://doi.org/10.1177/13624806241263916>
- Camp, N. P. (2024). Institutional interactions and racial inequality in policing: How everyday encounters bridge individuals, organizations, and institutions. *Social and Personality Psychology Compass*, 18(2). <https://doi.org/10.1111/spc3.12930>
- Cuppini, A. (2026). Whose Stories Count? *Journal of International Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqag014>
- Dagan, N., & Zimran, A. (2023). Punishment as text. *Punishment & Society*, 25(5), 1293–1311. <https://doi.org/10.1177/14624745231165380>
- Dahlman, C. (2024). A systematic account of probabilistic fallacies in legal fact-finding. *The International Journal of Evidence & Proof*, 28(1), 45–64. <https://doi.org/10.1177/13657127231209019>
- Di Nota, P. M., Huhta, J.-M., Boychuk, E. C., & Andersen, J. P. (2024). Police lethal force errors and stress physiology during video and live evaluation simulations. *Police Practice and Research*, 25(1), 90–100. <https://doi.org/10.1080/15614263.2023.2237624>
- Günther, M. (2024). Legal Proof Should Be Justified Belief of Guilt. *Legal Theory*, 30(3), 129–141. <https://doi.org/10.1017/S1352325224000089>
- Hassan, B. (2025). Procedural and Functional Sources of Trust in Police in Pakistan. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 40(1), 239–250. <https://doi.org/10.1007/s11896-025-09734-w>
- Ho, H. L. (2025). Should We Be Convicting People We Don't Believe to Be Guilty? *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, (9). https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i9.23105
- Huff, J., White, M. D., & Padilla, K. E. (2023). The Influence of Defendant Race/Ethnicity and Police Body-Worn Cameras on Traffic Case Processing. *Race and Justice*, 13(3), 346–369. <https://doi.org/10.1177/21533687211004696>
- Hunt, L. W. (2025). Police interrogation and fraudulent epistemic environments. *Journal of Public Policy*, 45(2), 201–223. <https://doi.org/10.1017/S0143814X25000030>
- Indarto. (2026). Police Integrity and the Code of Silence (CoS): Evidence from a Large-Scale Scenario-Based Survey in Indonesia. *Kejahatan & Keadilan: Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/kriminologi.v2.i1.1013>
- Kadir, Z. K. (2025). Kejahatan Berbasis Identitas Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal untuk Dunia Metaverse. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 124–137.
- Kadir, Z. K. (2026a). Mapping Recorded Homicide in Indonesia: An Ecological Criminological Analysis Using BPS Data. *Punggawa Law Review*, 1(2), 9–18.
- Kadir, Z. K. (2026b). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, 1(1), 1–10.

- Keatley, D. A. (2025). Prioritizing patterns in evidence: Applying the analysis of competing hypotheses framework to criminal investigations and cold cases. *Science & Justice*, 65(5), 101308. <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2025.101308>
- Kuen, K., & Kim, S. H. (2026). The making of police self-legitimacy: External and organizational mechanisms. *The British Journal of Criminology*. <https://doi.org/10.1093/bjc/azag032>
- Leigh, G. (2022). Murderous intent—The attitude of a murderer? *The Journal of Criminal Law*, 86(1), 18–28. <https://doi.org/10.1177/00220183211031057>
- Li, J. C. M., Zhang, S. Y., Sun, I. Y., & Ho, A. S. K. (2024). Police legitimacy and procedural justice for children and youth: a scoping review of definitions, determinants, and consequences. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1409080>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Martínez-Garay, L. (2023). Evidence-based sentencing and scientific evidence. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1309141>
- McCluskey, J. D., & Uchida, C. D. (2023). Video Data Analysis and Police Body-Worn Camera Footage. *Sociological Methods & Research*, 52(3), 1120–1154. <https://doi.org/10.1177/00491241231156968>
- Pardo, M. S. (2026). Legal Epistemology and Legal Proof. *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, (10). https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i10.23222
- Pears, J., & Easteal, P. (2025). Judicial Narratives and 'Reality': A Thematic Analysis of References to Family Violence in Sentencing Remarks for the Offence of Threat to Kill. *Laws*, 14(2), 15. <https://doi.org/10.3390/laws14020015>
- Picinali, F. (2023). Evidential reasoning, testimonial injustice and the fairness of the criminal trial. *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, (6). https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i6.22888
- Poirier, B., & Boivin, R. (2024). Examining how credibility shapes public perception of police interventions in the media. *Policing: An International Journal*, 47(1), 82–94. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-07-2023-0092>
- Raver, A., Lindholm, T., Gustafsson, P. U., & Alm, C. (2023). Memory accuracy, suggestibility and credibility in investigative interviews with native and non-native eyewitnesses. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1240822>
- Socia, K. M., Morabito, M. S., Bond, B. J., & Nader, E. S. (2021). Public Perceptions of Police Agency Fairness and the Willingness to Call Police. *The American Review of Public Administration*, 51(5), 360–373. <https://doi.org/10.1177/02750740211005699>
- Stacey, J., Opperman, S., Curran, J. M., & Harbison, S. A. (2025). Current state and barriers to global adoption of forensic evaluative reporting of findings given activity-level propositions. *Science & Justice*, 65(6), 101336. <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2025.101336>
- Stern, S. (2024). Omniscient Narrative Modes in Law: From Trial Strategy to the Fellow-Servant Rule. *Law, Culture and the Humanities*, 20(2), 291–305. <https://doi.org/10.1177/17438721231154449>
- Sunde, N. (2022). Unpacking the evidence elasticity of digital traces. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103946>
- Vakhitova, Z., Iliadis, M., Harris, B., Tyson, D., & Flynn, A. (2023). The merits and risks of body-worn camera footage in domestic and family violence incidents and legal proceedings: a study of police perceptions and experiences. *Policing and Society*, 33(2), 170–186. <https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2082421>